

# Otoritas Punggawa dan kepatuhan Sawinya di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada Masyarakat Nelayan Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)



## Punggawa authority and its Sawi compliance during the Covid-19 pandemic (Case study on Beba Fishing Community, Takalar Regency, South Sulawesi)

Arisnawawi , Darmawan Salman, Rahmat Muhammad, Muhammad Sabiq

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

### Article Info:

Diterima: 24 Juni 2022  
Disetujui: 15 Juli 2022  
Dipublikasi: 26 Agustus 2022

### Keyword:


Authority;  
Fishing Society;  
Covid 19;

**ABSTRAK.** Terpukulnya nelayan akibat pandemi Covid-19, tidak langsung menporak-porandakan jalinan kerjasama Punggawa-Sawi di Beba, Kabupaten Takalar. Kepatuhan para Sawi memilih bertahan bersama Punggawa harus dipotret dalam sudut yang berbeda. Hubungan tersebut tidak dapat lagi dilihat sebagai hubungan kepentingan materil, seperti upah kerja. Hal demikian karena keuntungan materil dalam hubungan mereka ditengah pandemi juga merosot tajam. Penelitian ini bertujuan menemukenali otoritas Punggawa dan kepatuhan Sawi yang dapat eksis meski di obok-obok oleh pandemi Covid-19 dan kondisi yang serba tidak menguntungkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Secara spesifik dan taktis, teknik analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas Punggawa yang terjalin dalam hubungan Punggawa-Sawi di Beba diperoleh secara tradisional. Mereka tidak diikat seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Kepatuhan Sawi terhadap punggawa tidak semata-mata karena kepentingan materil. Namun, kepatuhan mereka lebih didasarkan atas penokohan Punggawa lantaran kedermawanannya dan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan antara Punggawa dan Sawi. Kondisi demikian menjadikan hubungan Punggawa dan Sawi sangat kokoh sehingga tidak goyah meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19.

**ABSTRACT.** The beating of fishermen due to the Covid-19 pandemic does not necessarily damage the Punggawa-Sawi relationship in Beba, Takalar Regency. The obedience of the Sawi people in choosing to stay with the Punggawa must be photographed from a different angle. This relationship can no longer be seen as a relationship of material interests, such as wages. The reason is, the acquisition of material in their relationship in the midst of the pandemic has also fallen sharply. This study aims to identify Punggawa authority and Sawi compliance that can still exist despite being hit by the Covid-19 pandemic and unfavourable conditions. This study uses a qualitative method with case study analysis. Data sources are divided into two categories, namely primary and secondary sources. Data was collected by using in-depth interviews, observation and documentation techniques. Specifically and tactically, the data analysis technique was carried out following the Miles and Huberman model by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Punggawa authority which is woven into the Punggawa-Sawi relationship in Beba is obtained traditionally. They are not bound by a set of officially announced rules. Sawi's obedience to the retainer was not solely due to material interests. However, their obedience is based more on the characterization of Punggawa because of his generosity and the existence of a familial or kinship relationship between Punggawa and Sawi. This condition makes the relationship between Punggawa and Sawi very close so that it does not waver even in the midst of the Covid-19 pandemic.

### Korespondensi:

Arisnawawi  
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

 [Aris19n@gmail.com](mailto:Aris19n@gmail.com)

Copyright© November 2022, Arisnawawi, A., Salman, D., Muhammad, R., & Sabiq, M.  
Under License a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## 1. Pendahuluan

Kepatuhan Sawi terhadap Punggawa dalam sistem masyarakat nelayan di beberapa daerah bersifat fungsional, yaitu untuk jaminan sosial ekonomi. Memasuki masa pandemi Covid-19, segala aspek kehidupan mengalami penyesuaian dan perubahan. Menurut Kholis (2020), pendapatan nelayan turun di masa pandemi.

Hal tersebut terjadi karena sektor penjualan hasil tangkap ikan tersendat bahkan terhenti. Ia menyebutkan angka penurunan penghasilan nelayan jauh merosot tajam, bisa sampai 336 persen.

Salah satu masyarakat yang sangat terpukul dalam situasi ini adalah masyarakat nelayan Sulawesi Selatan. Hal demikian karena Sulawesi Selatan sangat memiliki potensi dalam bidang perikanan. Garis pantai yang sangat panjang berkisar 2.500 km dengan luas

wilayah penangkapan 12 mil dari laut serta perairan umum sekitar 144.425 Ha (Nardi, 2017). Keunggulan kondisi geografis tersebut turut mengalami penurunan hasil produksi ditengah pandemi.

Masyarakat nelayan Sulawesi Selatan umumnya dibagi menjadi nelayan mandiri dan nelayan berkelompok. Nelayan mandiri menurut Sabiq & Asriandi (2021) ialah nelayan yang menggunakan kapal kecil berawakkan 1-2 orang, jangkauan kapal tidak jauh dengan durasi waktu yang singkat. Sedangkan nelayan berkelompok menggunakan kapal jauh lebih besar, berawakkan 7-15 orang, jangkauan kapal sangat jauh dengan durasi waktu yang lama di tengah laut.

Hubungan kerja yang terjalin dalam nelayan berkelompok di Sulawesi Selatan biasanya disebut Punggawa-Sawi. Punggawa adalah seseorang yang memiliki modal alat-alat produksi (Alpiani, 2019) dan pemimpin operasional penangkapan di laut (Hasriyanti & Syarif, 2021). Pada hakekatnya setiap Punggawa adalah pemimpin atas Sawi. Sawi sendiri diperjelas oleh Hasriyanti & Syarif (2021) sebagai golongan nelayan yang dalam unit-unit usaha penangkapan ikan berstatus sebagai pembantu di kapal, atau lumrah kita kenal sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Hubungan keduanya baik dalam profesi sebagai nelayan berkelompok maupun sebagai individu yang hidup dalam suatu kehidupan masyarakat, merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Sistem hubungan kerja yang terjalin antara mereka tidak hanya terlihat pada saat melakukan penangkapan ikan, tapi juga terlihat dalam interaksi sosial sesama masyarakat nelayan. Meskipun terdapat perbedaan status diantara keduanya, mereka solid membentuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat (Wahyuni, 2018).

Pandangan yang berbeda dikatakan oleh Legiyo et al., (2019) dalam melihat hubungan Punggawa dan Sawi. Menurutnya, Sawi kerap kali mendapatkan eksploitasi dari Punggawanya. Hal demikian lantaran ketegantungan Sawi pada Punggawa, lapangan pekerjaan yang sempit, pendidikan yang rendah, dan ekonomi yang lemah. Kusnadi (2003) juga turut menekankan bahwa sistem Punggawa-Sawi adalah sistem ketegantungan. Adanya ketegantungan tersebut berpotensi digunakan oleh pihak yang kuat untuk melakukan tekanan, bahkan penindasan. Terlebih hubungan Punggawa Sawi itu harus berjalan dimasa pandemi Covid-19, dimana segala pekerjaan menjadi terbatas dan penghasilan menurun.

Ditengah terpukulnya nelayan akibat pandemi, beberapa nelayan tetap bertahan menjalin kerjasama Punggawa-Sawi. Salah satu dari nelayan tersebut adalah masyarakat nelayan Beba, Kabupaten Takalar. Mereka tetap memilih melaut ketimbang mencari pekerjaan lain, meskipun lebih berpeluang di tengah pandemi. Hal tersebut sangat urgen untuk diteliti sebagai upaya menjawab kemungkinan-kemungkinan dalam relasi mereka.

Kepatuhan para Sawi memilih bertahan bersama Punggawa tidak dapat lagi dilihat sebagai hubungan kepentingan materil seperti upah kerja. Sebab keuntungan materil dalam hubungan mereka ditengah pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan. Olehnya itu penting untuk meneliti bagaimana otoritas Punggawa dan kepatuhan sawinya di masa pandemi Covid-19.

Penelitian-penelitian tentang otoritas umumnya hanya terfokus pada studi masyarakat religius (keagamaan) dan masyarakat adat. Seperti penelitian Arrobi & Nadzifah (2020) yang menemukan otoritas agama baru, berupa ustad selebritis maupun otoritas agama lama, seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU mengalami konvergensi wacana dan praksis keagamaan dalam merespons Covid-19. Penelitian otoritas keagamaan juga dilakukan oleh Siregar & Hsb (2020), yang menemukan otoritas agama di Indonesia masih memainkan peranan yang signifikan dan digunakan secara aktif merespons situasi pandemi Covid-19 melalui berbagai cara.

Penelitian otoritas pada masyarakat Adat juga tidak kalah banyak. Penelitian Irawan, (2017) menemukan peran penting seorang pemimpin adat dalam pelestarian tradisi gotong-royong masyarakat adat Dayak Wehea. Kartika & Edison (2020) juga memperkuat hipotesa tersebut bahwa otoritas pemangku adat yang disertai kepatuhan warganya sangat berkontribusi dalam mempertahankan adat istiadat di era digital. Penelitian Manuel-Sagon (2020) tentang masyarakat adat Hawaii juga turut memperkaya kajian otoritas pada masyarakat adat. Mereka

menemukan nilai lokal *kapu aloha* menjadi inkubator otoritas adat yang digunakan untuk merespon berbagai penindasan yang dilakukan oleh masyarakat luar.

Penelitian-penelitian tentang Punggawa-Sawi atau kelas sosial pada masyarakat nelayan sering digambarkan berjalan secara eksploitatif. Legiyo et al. (2019) menemukan eksploitasi yang terjadi pada Punggawa-Sawi bagan perahu di Pangkep pada sistem bagi hasil, barang perbekalan melaut dan jeratan hutang yang dialami oleh Sawi. Sedangkan Abdullahi et al. (2020) menemukan eksploitasi yang terjadi antara Punggawa dan Sawi di Jeneponto tidak dalam bentuk materil, akan tetapi dalam bentuk penggunaan kekuasaan yang dilakukan untuk tujuan popularitas, status maupun kepentingan politik kepada masyarakat pengguna lahan Punggawa.

Penelitian Punggawa dan Sawi sebelumnya hanya terbatas melihat relasi mereka secara kalkulatif materil. Selain itu, hubungan tersebut kerap digambarkan berjalan eksploitatif. Pada saat yang bersamaan, belum ditemukan kajian pertautan otoritas dan kepatuhan pada masyarakat nelayan, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini karena akan melihat masyarakat nelayan dalam kerangka otoritas dan kepatuhan di tengah guncangan pandemi Covid-19. Dua kelas sosial (Punggawa dan Sawi) masyarakat nelayan yang menonjol di Sulawesi Selatan ini masih jarang diangkat ke permukaan sebagai objek studi, terlebih pada kajian-kajian fungsional. Penelitian ini bertujuan menemukan otoritas Punggawa dan kepatuhan Sawi yang dapat eksis meski di obok-obok oleh pandemi Covid-19 dan kondisi yang serba tidak menguntungkan.

Kekokohan hubungan Punggawa dan Sawi harus dipotret dalam sudut yang berbeda, lantaran hubungan tersebut tidak lagi dapat dilihat sebagai hubungan kepentingan materil. Kebaruan dari penelitian ini, akan memotret pertautan otoritas Punggawa dan kepatuhan Sawinya di tengah perubahan yang berlangsung.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis studi kasus. Penelitian studi kasus pada dasarnya memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam dan mendetail sehingga mampu membongkar realitas dibalik fenomena (Rahardjo, 2017; Dewi, 2019). Fokus studi kasus ada pada upaya spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik berupa entitas yang konkret misalnya individu, kelompok kecil, organisasi atau kemitraan (Yin, 2009).

Penelitian ini termasuk jenis studi kasus instrumental karena bertujuan untuk memahami isu, problem, keprihatinan dan mengeksplorasi sebuah konsep atau mengilustrasikan persoalan (Stake, 1995). Penelitian ini menjadikan Unit Kasus Masyarakat Nelayan Beba untuk mengeksplorasi sebuah konsep otoritas Punggawa dan kepatuhan Sawinya. Penentuan informan dalam penelitian ini mengikuti prosedur purposif, yakni menentukan terlebih dahulu kelompok peserta yang akan dijadikan informan, tentu dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sayidah, 2018).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah Punggawa, yang terdiri dari Punggawa pemilik modal uang, Punggawa pemilik modal sarana produksi, Punggawa laut/kapten ataupun Punggawa yang memiliki semua modal yang ada. Informan lain dalam penelitian ini adalah Sawi atau buruh kapal yang bekerja pada Punggawa. Informan penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 Punggawa dan 6 Sawi. Pengambilan data dilakukan pada masing-masing kelompok nelayan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam kategori: primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 1. Wawancara mendalam, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Sedang teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data atau display, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data menurut Creswell (2017) secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data. Teknik analisis data yang dimaksudkan di sini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengorganisir data, mengelola dan mensintesis data, serta

mempelajari dan memutuskan dari apa yang disampaikan oleh informan. Penelitian ini dilaksanakan di Beba, Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dengan mengelola sumberdaya perikanan. Masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain. Menurut Hidayat et al. (2019) bahwa beberapa kawasan pesisir relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya lebih bersifat heterogen atau beragam, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang intens.

Namun, aktivitas ekonomi masyarakat nelayan seringkali tersendat dalam berbagai hal. Menurut Singkawijaya & Hilman (2021) dari hasil penelitiannya, bahwa faktor yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan di sekitar PPI Cikidang adalah faktor alam yang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap ketinggian gelombang dan musim penangkapan. Ditambah lagi dengan adanya pendangkalan di muara sungai, dermaga dan kolam yang seringkali menghambat keluar masuknya kapal nelayan. Kondisi demikian diperburuk menurut Suhu (2020) karena sebagian masyarakat nelayan masih terkesan pasif dalam memahami pemberdayaan ekonomi.

Adanya pandemi Covid-19 yang disertai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat semakin memperparah sistem sosial ekonomi masyarakat nelayan, baik dari sistem produksi, pengolahan hasil produksi maupun sistem distribusi. Menurut Kholis (2020) bahwa pendapatan nelayan secara umum telah mengalami penurunan drastis di masa pandemi lantaran sektor penjualan hasil tangkap ikan tersendat bahkan terhenti.

Masyarakat nelayan Beba, Kabupaten Takalar salah satu nelayan yang terdampak Covid-19. Meskipun penelitian Asni et al. (2022) menunjukkan hasil uji organoleptik dan pengukuran rata-rata pH ikan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Beba masih memiliki mutu kesegaran yang baik. Namun, pendapatan mereka mengalami penurunan lantaran tersendatnya proses pemasaran dari nelayan sebagai produsen ke masyarakat luas sebagai konsumen.

**Komentar 1**  
 "Pemasukan menurun dan penjualan tangkapan tidak lancar seperti dulu"

**Komentar 2**  
 "Di sini dulu selalu ramai, pas masuk pandemi jarangmi ada pembeli. Sampai-sampai ada yang tutup warungnya"

Seperti pada umumnya masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan, nelayan Beba juga terdiri dari nelayan mandiri dan nelayan berkelompok. Hubungan kerja yang terjalin dalam nelayan berkelompok, disebut sebagai hubungan Punggawa-Sawi. Punggawa adalah sebutan kepada orang yang memiliki modal (gelar sosial), sedangkan Sawi adalah pekerja atau anak buah kapal yang bekerja pada Punggawa.

Terdapat berbagai tipe atau jenis Punggawa dalam masyarakat nelayan Beba. Seperti Punggawa yang memiliki modal uang, Punggawa yang memiliki alat-alat produksi dan Punggawa yang memimpin kapal di laut. Beberapa Punggawa memiliki dua atau lebih tipe punggawa tersebut secara bersamaan. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan Tabel 1.

Tabel 1. Berbagai tipe atau jenis Punggawa dalam masyarakat nelayan Beba.

Nelayan Berkelompok	Kriteria
Punggawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilik modal uang</li> <li>• Pemilik modal sarana produksi</li> <li>• Kapten laut</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilik modal uang dan sarana produksi</li> <li>• Pemilik modal uang dan kapten laut</li> <li>• Pemilik modal sarana produksi dan kapten laut</li> <li>• Pemilik modal uang, sarana produksi dan kapten kapal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sawi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak Buah Kapal</li> </ul>

Pandemi yang disertai kebijakan-kebijakan pemerintah, sangat berdampak pada proses pendistribusian hasil tangkap nelayan. Aktivitas di pelelangan ikan yang biasanya dipadati pembeli, kini merosot tajam. Selain itu, kuliner-kuliner di tempat pelelangan juga sepi. Ikan di pelelangan bisa sampai berhari-hari atau lebih lama dibandingkan sebelum Covid-19.

Tidak hanya sampai disitu, proses penangkapan ikan di laut pada masa pandemi juga terganggu. Terdapat pembatasan pembelian bahan bakar kapal besar hingga 50% dari penggunaan sebelumnya. Bahkan beberapa diantara mereka mengaku sampai tidak diberikan surat izin melaut. Tanpa surat tersebut, mereka dapat terkena razia saat kedatangan beroperasi.

**Komentar 3**  
 "Ada batasan pembelian solar yang dahulunya bisa 40 jergen, sekarang hanya 20 jergen. Baru kita tidak diberikan surat izin. Kalau di tau ada patroli di tengah laut, kita cari rute lain"

Patuhnya Sawi untuk tetap bertahan dalam hubungan Punggawa-Sawi di Beba salah satunya disebabkan operasionalisasi otoritas. Otoritas merupakan kekuasaan yang bisa mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Menurut Weber (1968), keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (legitimasi), dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum atau aturan. Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Jadi otoritas menuntut adanya ketaatan. Marbun (1996) memperjelas bahwa kekuasaan tidak memiliki arti tanpa otoritas.

Weber (1968) membagi otoritas menjadi tiga bentuk, yaitu otoritas legal-rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Otoritas hanya dimiliki oleh beberapa orang. Otoritas-otoritas ini yang menjadikan pemimpin sebagai sosok yang demikian dihargai dan dipatuhi dalam sebuah kelompok masyarakat, termasuk Punggawa dalam masyarakat nelayan.

Otoritas legal-rasional didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi, diatur secara impersonal (Damsar, 2017) dan terstruktur. Otoritas legal-rasional mendapatkan pengakuan ataupun legitimasi berdasarkan hukum atau aturan resmi untuk mengeluarkan perintah, layaknya birokrasi (Shofi & Talkah, 2021). Otoritas ini akan bersinggungan dengan prosedur pengangkatan maupun pemecatan (Chairi, 2019).

Otoritas kharismatik menurut Weber (1968) adalah kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang yang diakui oleh orang lain. Otoritas ini diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa, dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan-kekuatan

dan kualitas supernatural atau adimanusiawi (Damsar, 2017) dan diakui secara umum.

Otoritas tradisional yang dimaksudkan Weber adalah otoritas yang didasarkan atas tradisi dan kebiasaan (Ritzer, 2015) serta aturan dan kekuatan zaman dahulu (Damsar, 2017). Keabsahan dari otoritas tradisional didasarkan pada aturan-aturan tradisional yang sudah lama ada di kehidupan masyarakat dan diturunkan secara turun temurun (Weber, 1968).

### 3.1. Otoritas Punggawa Terhadap Sawi Pada Masa Pandemi

Hubungan Punggawa dan Sawi pada masyarakat nelayan Beba, didasarkan pada hubungan kekerabatan. Pengangkatan anak buah kapal dan karyawan masih mengandalkan hubungan pertalian darah. Mereka solid menolak pekerja dari luar, baik sebagai anak buah kapal atau Sawi maupun sebagai karyawan di usaha pengelolaan hasil produksi. Alhasil, profesi nelayan maupun usaha pengelolaan hasil produksi nelayan dilanjutkan secara turun temurun.

#### Komentar 4

*"Anak buah kapal di sini berasal dari keluarga semua. Tidak Ada orang luar"*

Penyebutan pemilik modal sebagai Punggawa dan pekerja sebagai Sawi sendiri berasal dari bahasa tradisional setempat. Mereka sangat jarang menggunakan istilah bos atau buruh yang merujuk kepada pemilik modal dan pekerja. Kerjasama antar Punggawa dan Sawi berjalan tanpa perjanjian kontrak hitam diatas putih, melainkan kesepakatan secara lisan seperti kebiasaan orang terdahulu mereka.

Memasuki masa pandemi Covid-19, hubungan Punggawa dan Sawi tidak begitu terguncang. Punggawa dan Sawi tetap melanjutkan hubungan kerja mereka seperti pada umumnya, meskipun pendapatan mereka menurun. Berkurangnya pendapatan tersebut lantaran adanya penurunan aktivitas melaut akibat pembatasan pembelian bahan bakar kapal besar hingga 50% dari penggunaan sebelumnya. Bahkan dalam keadaan tertentu, nelayan kelompok tidak diberikan izin surat melaut.

Jika pendapatan Punggawa berkurang, maka pendapatan Sawi ikut juga berkurang. Hal demikian karena proses pembagian upah Sawi didasarkan pada jumlah hasil penjualan tangkapan. Sebelum pandemi, pendapatan Sawi berkisar Rp.2.500.000-Rp.4.000.000/bulan. Sedangkan pendapatan Punggawa, dua kali lipat dari pendapatan Sawi. Memasuki masa pandemi, pendapatan mereka menurun. Bahkan capai di bawah 50% dari pendapatan sebelumnya. Merosotnya pendapatan Nelayan demikian tidak sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka tetap melaut meskipun dengan upah yang sangat rendah. Mereka berprinsip bahwa, sedikit dibagi sedikit jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali.

#### Komentar 5

*"Kami tetap melaut untuk bertahan hidup. Kalau sedikit di dapat, sedikit juga nadapat anggota"*

Kebiasaan rutin perawatan kapal yang dilakukan satu kali dalam satu tahun oleh Punggawa dan Sawi masih tetap berjalan pada masa pandemi, meskipun pekerjaan tersebut dilakukan tanpa upah. Hal demikian karena mereka memiliki rasa kepemilikan bersama terhadap kapal. Jika kapal mengalami kerusakan, maka

bukan hanya Punggawa sebagai pemilik kapal yang akan merugi, melainkan Sawinya juga. Sehingga segala peralatan yang digunakan dalam menangkap ikan, akan terawat dengan baik.

Ketika Sawi memerlukan pinjaman uang, mereka tidak sungkan untuk ke Punggawanya. Punggawa juga tidak ragu untuk meminjamkan kepada Sawinya, baik ketika Sawi melaut atau tidak. Pembayaran hutang Sawi akan diambil dari pemotongan pembagian hasil penjualan ikan. Hubungan mereka terbangun atas dasar kepercayaan (trust). Kondisi-kondisi demikian yang menjadikan Punggawa dan Sawi memiliki hubungan yang kokoh, bahkan tidak goyah dimasa pandemi Covid-19.

#### Komentar 6

*"Biasa kami bantu anggota, nanti tinggal dipotong saja upahnya"*

Otoritas Punggawa yang terjalin dalam hubungan Punggawa-Sawi diperoleh secara tradisional. Mereka tidak diikat seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi, sebagaimana otoritas rasioanl. Punggawa tidak mendapatkan pengakuan ataupun legitimasi berdasarkan hukum atau aturan resmi untuk mengeluarkan perintah, layaknya birokrasi. Melainkan, kepribadian Punggawa sudah tersosialisasi dengan baik secara turun-temurun sebagai orang yang baik, terkhusus kepada Sawinya.

### 3.2. Bentuk Kepatuhan Sawi Terhadap Punggawa di Masa Pandemi Covid-19

Kepatuhan Sawi terhadap Punggawa tidak semata-mata karena adanya keuntungan materil berupa pendapatan. Kepatuhan para Sawi juga sebagai bentuk balas budi terhadap bantuan-bantuan dari Punggawanya. Punggawa dianggap sebagai tokoh, memiliki sifat kederawanan yang senantiasa siap membantu Sawinya. Khususnya kepatuhan Sawi terhadap Punggawa sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan.

#### Komentar 7

*"Kalau kami membutuhkan bantuan, biasa langsung ke Punggawa"*

Sebagai pemilik modal, Punggawa memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dengan atau tanpa pertimbangan Sawi dan Sawi wajib mematuhi. Sehingga, meskipun dalam keadaan sulit seperti masa pandemi Covid-19 sekalipun, Sawi tetap bekerja dengan Punggawa.

## 4. Simpulan

Otoritas Punggawa yang terjalin dalam hubungan Punggawa-Sawi di Beba, Kabupaten Takalar diperoleh secara tradisional. Mereka tidak diikat seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi, tidak juga diatur secara impersonal sebagaimana otoritas legal-rasional. Punggawa tidak mendapatkan pengakuan ataupun legitimasi berdasarkan hukum atau aturan resmi untuk mengeluarkan perintah, layaknya birokrasi.

Kepatuhan Sawi terhadap punggawa tidak semata-mata karena kepentingan materil. Kepatuhan mereka juga didasarkan atas penokohan Punggawa lantaran kederawananannya dan adanya hubungan kekerabatan dengan Punggawa. Kondisi demikian menjadikan hubungan Punggawa dan Sawi sangat kuat dan tidak bisa goyah meskipun ditengah gempuran pandemi Covid-19.

## Ucapan Terima Kasih

Setiap karya tidak mungkin menafikan keterlibatan yang lain dalam ragam andil. Kesempatan berbagia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyertai dalam penyusunan tulisan ini, baik secara moril maupun materil. Teristimewa terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat nelayan dan teman-teman yang banyak membantu di lapangan. Berkat bala bantuan, tenaga, waktu dan kerjasamanya, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data di lokasi penelitian tanpa hambatan yang berarti.

## Publisher's Note

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna on behalf of SRM Publishing remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

## Supplementary files

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analyzed during the current study, and/or contains supplementary material, which is available to authorized users.

## Competing interest

All author(s) declare no competing interest.

## Referensi

- Abdullahi, A. B., Saiful, N. A., Ali, S. S., & Demmallino, E. 2020. Eksploitasi dan Kekuasaan: Studi Kasus Penggunaan Sumberdaya Lahan di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto. *Agrokompleks*, 2(2), 1-11.
- Alpiani, A. 2019. Pola Hubungan dan Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi Pada Alat Tangkap Bagan Rambo di Kabupaten Barru. *Gorontalo Fisheries Journal*, 2(1), 37-48.
- Arrobi, M. Z., & Nadzifah, A. 2020. Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi? *Maarif*, 15(1), 197-215.
- Asni, A., Kasmawati, K., Ernarningsih, E., & Tajuddin, M. 2022. ANALISIS PENANGANAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN YANG DIDARATKAN DI TEMPAT PNDARATAN IKAN BEBA KABUPATEN TAKALAR. *JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan*, 5(1), 40-50.
- Chairi, E. 2019. Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia : Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 197-215.
- Creswell, J. W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 634p.
- Damsar. 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana. 228p.
- Dewi, R. P. 2019. *Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ. 28p.
- Hasriyanti, H., & Syarif, E. 2021. *Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Laut Melalui Kearifan Lokal Sistem Punggawa-Sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. 3(2), 171-182.
- Hidayat, R., Samudin, M. T., & Pariyati, P. 2019. Struktur Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 1433-1444.
- Irawan, D. 2017. Kepemimpinan Kepala Adat dalam Mempertahankan Gotong Royong Masyarakat Adat Dayak Wehea di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 5(4), 591-600.
- Kartika, T., & Edison, E. 2020. Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1), 56-62.
- Kholis, M. N. 2020. Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu. *Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 1-11.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS. 148p.
- Legiyo, L., Agustang, A., & Hakim, M. 2019. Relasi Punggawa dan Sawi pada Bagan Perahu (Studi Kasus Nelayandi Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep. *Eprints*, 1-14.
- Manuel-Sagon, K. 2020. An Awakening of the Hawaiian W ening of the Hawaiian Way of Lif y of Life: Framing Kapu Aloha aming Kapu Aloha and the Mauna Kea Controversy. *PUREinsights*, 9(1), 1-11.
- Marbun, S. 1996. Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(6), 28-43.
- Nardi, S. 2017. *Kelembagaan Punggawa Sawi (Studi Kasus Nelayan Ikan Terbang di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah. 78p.
- Rahardjo, M. 2017. *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 28p.
- Ritzer, G. 2015. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group. 758p.
- Sabiq, M., & Asriandi, A. 2021. Strategi event hybrid untuk komunitas nelayan (Studi kasus komunitas nelayan dusun Beba, Kabupaten Takalar selama pandemi Covid-19). *Jurnal Akuakultur, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, 5(2), 39-43.
- Sayidah, N. 2018. *Metodologi Penelitian. Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 210p.
- Shofi, I., & Talkah. 2021. Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan). *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 134-156.
- Singkawijaya, E. B., & Hilman, I. 2021. AKTIFITAS KERUANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI PANGKALAN PNDARATAN IKAN (PPI) CIKIDANG PANGANDARAN. *Journal of Geography Education*, 2(2). 2-14.
- Siregar, P., & Hsb, M. O. 2020. Peran Otoritas Agama di Masa Pandemi Covid 19. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 16(2), 128-138.
- Stake, R. 1995. *The Art Of Case Study Research*. California: Sage. 175p.
- Suhu, B. L. 2020. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (StudiDi DesaMaitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 1(1), 17-24.
- Wahyuni, N. 2018. Sistem Punggawa-Sawi Dalam Komunitas Nelayan (Studi Kasus Di Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar). *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 1(2), 27-37.
- Weber, M. 1968. *On Charisma and Institution Building* The Universty of Chicago Press. 370p.
- Yin, R. K. 2009. *Case study research: Design and methods*. California: Sage. 219p.

**Arisnawawi Arisnawawi**, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: aris19n@gmail.com

**Darmawan Salman**, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: darmawansalman@gmail.com

**Rahmat Muhammad**, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: rahmatmuhammad@gmail.com

**Muhammad Sabiq**, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: muh.sabiq77@gmail.com, URL Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=CzhEhBYAAAAJ&hl=id>

---

**How to cite this article:**

Arisnawawi, A., Salman, D., Muhammad, R., & Sabiq, M., 2022. *Punggawa authority and its Sawi compliance during the Covid-19 Pandemic (Case study on Beba Fishing Community, Takalar Regency)*. *Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 6(2): 83-88. <https://doi.org/10.29239/j.akuatikisle.6.2.83-88>

---